

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Kemitraan

1. Pengertian Manajemen Kemitraan

Manajemen kemitraan berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan kemitraan. Secara etimologis manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kemudian kata tersebut digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti pengelolaan.¹ Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²

Lanjut, George R. Terry dalam Andang mendefinisikan manajemen adalah cara pencapaian tujuan yang ditentukan lebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.³ Dalam bukunya Suharsimi Arikunto, Sondang Palan Siagian mendefinisikan manajemen adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Lanjut menurut Pariata Westra, manajemen adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha tertentu.⁴

Pengertian manajemen dari berbagai definisi diatas dapat diambil benang merahnya yaitu serangkaian kegiatan atau proses pengelolaan usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu wadah organisasi menuju pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Jika dipandang dari segi pendidikan, yaitu serangkaian kegiatan

¹ Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam Meniti Jalan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: P3M STAIN Tulungagung dengan pustaka pelajar, 2003), 296.

² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 54.

³ Andang, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, Konsep Strategi & Inovasi Menuju Sekolah Efektif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 21.

⁴ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), 3.

atau proses pengelolaan usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi/lembaga pendidikan untuk menuju pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara bersama melalui cara yang efektif dan efisien.

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner* yang berarti pasangan, jodoh, sekutu, sehingga *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.⁵ The American Heritage Dictionary dalam Rukmana mendefinisikan kemitraan sebagai *a relationship between individuals or grup that is characterized by mutual cooperation and responsibility, as for the achievement of a specified goal*. Yang artinya sebuah hubungan antara individu atau grup yang ditandai dengan kerjasama dan tanggung jawab untuk pencapaian yang ditentukan.⁶

Menurut pedoman pengembangan program kemitraan, kemitraan merupakan kerjasama antara pusat dan daerah dengan memberdayakan potensi masing-masing untuk melakukan pengkajian dan pengembangan kependidikan khususnya pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.⁷ Dari pengertian tersebut terdapat esensi dari kemitraan berupa kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam mewujudkan pengkajian dan pengembangan pendidikan. Kemitraan adalah bentuk membangun hubungan atau relasi. Jamal menguatkan bahwa semakin banyak relasi yang berhasil dibangun, semakin baik bagi lembaga karena akan memperluas akses dan peluang untuk berkembang.⁸ Kemitraan tersebut biasanya terjalin dengan adanya komitmen berupa kesepakatan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kemitraan adalah serangkaian kegiatan atau proses pengelolaan usaha kerjasama antara

⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), 129.

⁶ Nana Rukmana, *Strategic Partnering for Educational Management (Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 59.

⁷ Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, *Pendoman Pengembangan Program Kemitraan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), 4.

⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Manajemen Efektif Marketing Sekolah, Strategi Menerapkan Jiwa Kompetisi dan Sportifitas untuk Melahirkan Sekolah Unggulan* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 138.

pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara bersama melalui cara yang efektif dan efisien.

2. Faktor-faktor Strategis Dalam Kemitraan

Sesuai dengan kebijakan “*link and match*” penyelenggaraan pendidikan harus bekerjasama dengan pemakai lulusan, agar lulusan bisa sesuai dengan kebutuhan. Jika hal tersebut dirasa masih kurang, maka lembaga pendidikan bisa memperluas kerjasama baik dalam hal bidang studi, jenjang pendidikan, maupun bantuan tenaga pengajar lapangan. Secara spesifik Tony Lendrum mengemukakan tentang sembilan kata kunci yang dapat dijadikan indikator keberhasilan strategis suatu kemitraan, yakni : a. *cooperative development*, b. *sucesful*, c. *long-term*, d. *strategic*, e. *mutual trust*, f. *world class/best practice*, g. *sustainable competitive advantage*, h. *mutual benefit for all the partners*, i. *separate and positive impact*.⁹

Chip R. Bell menjelaskan tentang kemitraan yang kuat yakni sebagai berikut :

- a. Kemitraan yang kuat terpancang dalam sikap kedermawananan
- b. Kemitraan yang kuat berlandaskan kepercayaan.
- c. Kemitraan yang kuat ditunjang oleh tujuan bersama
- d. Kemitraan yang kuat adalah kerjasama yang dijalin dengan kejujuran
- e. Kemitraan yang kuat berdasarkan keseimbangan
- f. Kemitraan yang kuat berdasarkan keindahan¹⁰

3. Fungsi Manajemen Kemitraan

Fungsi memiliki arti yaitu sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat digolongkan dalam suatu kelompok sehingga membentuk suatu kesatuan administratif.¹¹ Kegiatan-kegiatan tersebut mendukung jalannya manajemen.

⁹ Nana Rukmana, *Strategic Partnering For Educational Management* (Bandung: Alfabeta, 2006), 72-73.

¹⁰ Ibid, 74.

¹¹ Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Gramedia, 2008), 17.

Menurut George R. Terry menyatakan manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling*.¹² Agar lebih jelasnya mengenai proses tersebut, simak penjelasan berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah langkah pertama yang dibuat dalam upaya menjalankan proses manajemen. Perencanaan merupakan pedoman kerja bagi para pelaksana terkait, baik manajer maupun staf dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing. Perencanaan dapat diartikan menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.¹³

Ada beberapa dalam perencanaan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu :

1) Prakiraan (*Forecasting*)

Prakiraan adalah membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan.¹⁴ Masa lampau dan masa kini organisasi pendidikan, dikaji terlebih dahulu sebelum hal-hal yang akan dilakukan tersebut dirumuskan. Apa yang ada pada masa lampau dan masa kini berhasil dapat diulangi dan bahkan dapat ditingkatkan, sedangkan yang gagal dapat dijadikan pelajaran.

2) Perumusan Tujuan (*Objectives*)

Berdasarkan perkiraan dengan antisipasi ke depan, barulah dapat dirumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Penggolongan tujuan tersebut macam-macam sesuai dengan sudut kepentingan, lingkup/cakupan, dan tingkatan lembaga pendidikan.¹⁵

3) Kebijakan (*Policy*)

Kebijakan disini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan. Bisa terjadi, satu tujuan mencakup satu kegiatan atau lebih.

¹² George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 9.

¹³ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 60.

¹⁴ Ali Imron, *Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 67.

¹⁵ *Ibid*, 69.

4) Pemrograman (*Programming*)

Yang dimaksud programming adalah seleksi atas kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah *policy*. Kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi perlu diseleksi.

5) Langkah-langkah (*Procedure*)

Langkah-langkah (*Procedure*) merupakan kegiatan-kegiatan yang telah diseleksi pada langkah programming tersebut diurutkan, mana yang harus didahulukan, dan mana yang harus dikemudikan. Dengan kata lain, seorang perencana direkomendasikan untuk menentukan mana jenis kegiatan yang menjadi skala prioritas dan mana yang tidak menjadi skala prioritas.

6) Penjadwalan (*schedule*)

Schedule adalah penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana langkah programming. Jadwal tersebut perlu dibuat, agar kegiatan-kegiatan yang telah dirutkan pelaksanaannya menjadi konkret kapan dilaksanakan dan siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat di dalamnya.

7) Pembiayaan (*budgetting*)

Dalam pembiayaan ini, ada dua kegiatan yang dilaksanakan, yaitu mengalokasikan anggaran dan penentuan sumber anggaran. Dalam merencanakan anggaran, aspek pemerataan juga harus dipertimbangkan. Setelah anggaran dialokasikan, sumber-sumber anggaran juga perlu ditetapkan.

Tujuan diadakannya perencanaan adalah 1) sebagai standar pengawasan, yaitu kecocokan pelaksanaan dengan perencanaanya, 2) mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan, 3) mengetahui siapa saja yang terlibat, 4) mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, 5) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu, 6) memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan, 7) menyasikan dan memadukan

beberapa subkegiatan, 8) mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, 9) mengarahkan pada pencapaian tujuan.¹⁶

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah membagi pekerjaan diantara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan yang diperlukan.¹⁷ Pengertian senada diungkapkan oleh Ibrahim yaitu pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokkan semua tugas, tanggung jawab, wewenang, komponen dalam proses kerjasama sehingga tercipta suatu sistem kerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁸ Tujuan pengorganisasian yaitu : 1) mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada lembaga pendidikan, 2) memperlancar usaha kerjasama antara orang-orang yang bekerja sama di tingkat satuan pendidikan, 3) mengatur lalu lintas hubungan antara orang-orang, badan-badan, unit-unit kerja yang ada di lembaga pendidikan sehingga terciptalah *ream work* yang baik.¹⁹ Sistem tersebut yang kemudian akan dilanjutkan pada proses pelaksanaan kemitraan madrasah.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau *actualing* kegiatan menggerakkan anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dan rencana yang telah dibuat. Dalam kaitan pelaksanaan ini kegiatannya tertuju pada apa yang telah direncanakan pada tahap awal tadi. Kemudian mengeksekusinya berupa tindakan lapangan sehingga menghasilkan tindakan nyata.

d. Evaluasi

Controlling (pengawasan, evaluasi, dan pengamatan) adalah kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan. Dalam program pengendalian, terdapat proses

¹⁶ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 60.

¹⁷ Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 28.

¹⁸ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar dari Sentralisasi menuju Desentralisasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 43.

¹⁹ Ali Imron, *Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 91-92.

evaluasi. Adapun fungsi evaluasi program dalam lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Evaluasi berfungsi selektif, melalui evaluasi dalam pelaksanaan program humas, sekolah mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap berbagai kinerja, apakah itu tetap dilaksanakan, dimodifikasi, atau ditinggalkan.
- 2) Evaluasi berfungsi diagnostik, apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, dengan melihat hasilnya, sekolah akan mengetahui berbagai kelemahan dari apa yang selama ini dilaksanakan. Ketika sekolah telah menemukan kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi ini dilembaganya, dengan mudah sekolah akan mencari jalan alternatif dalam pemecahan problematika yang dialami melalui berbagai cara, tergantung pada tingkat kelemahannya dan kebutuhan sekolah serta masyarakat.
- 3) Evaluasi berfungsi sebagai pengukuhan keberhasilan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil ditetapkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pengembangan program jika memungkinkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor seperti guru, siswa, kurikulum, sarana, dan sebagainya.

Evaluasi dalam pelaksanaan program hubungan masyarakat di lembaga pendidikan dilaksanakan untuk memperoleh informasi dalam meningkatkan efektifitas belajar siswa dan pengembangan sekolah, memperoleh bahan *feedback*, memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran di sekolah, menyempurnakan serta mengembangkan program, mengetahui kesukaran-kesukaran selama belajar dan bagaimana mencari jalan keluarnya. Melalui evaluasi tersebut terlihat apa yang harus dipertahankan, dan apa yang harus dirubah, kemudian apa yang

²⁰ Sri Ninarti, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 309.

harus dirubah ataupun diperbaiki bahkan dikembangkan. Melalui evaluasi tersebut sehingga terbentuk program yang dijalankan sekolah selalu berkembang secara dinamis.

4. Pola Kemitraan

Dalam pelaksanaan program kegiatan kerjasama antara sekolah dengan industri perlu disepakati model atau pola pengaturan penyelenggaraan program, khususnya yang menyangkut tentang kapan dilaksanakan di sekolah dan kapan dilaksanakan di Institusi Pasangan. Dengan demikian praktik kerja industri diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi tertentu secara terstandar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perencanaan, penyelenggaraan dan penilaian pendidikan harus senantiasa mengacu pada pencapaian standar kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja. Oleh karena itu, penyelenggara pendidikan, sekolah kejuruan tidak mempersiapkan peserta didiknya berorientasi pada pendidikan akademis, tetapi kepada pendidikan dan pelatihan sehingga peserta didik memiliki ketrampilan yang sesuai dengan program atau bidang ketrampilan yang menjadi ciri atau karakteristik setiap lembaga kejuruan tersebut.

Adapun Kerjasama yang diselenggarakan oleh sekolah dengan dunia internal atau eksternal (DU/DI), antara lain:²¹

a. Pola Kerjasama Program Permagangan /PKL/ Prakerin

Praktik kerja industri, pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia kerja serta terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

²¹ Yulianto dan Budi Sutrisno, "Pengelolaan Kerjasama Sekolah dengan Dunia Usaha/Dunia Industri", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 24, No. 1 (2014), 67.

Praktik kerja industri merupakan pola penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di dua tempat yaitu disekolah dan didunia usaha/industri/instansi sebagai institusi pasangan. Pola penyelenggaran prakerin dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka lebih mendekatkan mutu lulusan dengan kemampuan yang diminta oleh dunia usaha dan dunia industri. Secara umum pelaksanaan program praktik kerja industri ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dibidang teknologi, penyesuaian diri dengan iklim dunia kerja yang sebenarnya. Setelah peserta didik melaksanakan program praktik kerja industri diharapkan memperoleh pengalaman yang mencakup tinjauan tentang perusahaan, kegiatan-kegiatan praktik yang berhubungan langsung dengan teknologi, mempersiapkan diri untuk mampu belajar dan bekerja secara mandiri, bekerja dalam suatu tim dan mengembangkan potensi serta keahlian sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.

Penyelenggaraan praktik kerja industri secara umum bertujuan untuk menjawab tantangan industri, secara rinci praktik kerja industri bertujuan²² :

- 1) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat kemampuan kompetensi, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja
- 2) Meningkatkan dan memperkuat keterkaitan dan kesepadanan antara pembelajaran kejuruan dan dunia kerja
- 3) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran
- 4) Pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Praktik kerja industri juga mensyaratkan adanya institusi lain sehingga terdapat kerjasama dan kesepakatan antara institusi pembelajaran (SMK) dan institusi lain tersebut (industri/perusahaan

²² Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar = Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Jakarta: Paradigma, 2001), 128.

atau institusi lain yang berhubungan dengan lapangan kerja) yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan keahlian kejuruan untuk bersama-sama menyelenggarakan pembelajaran keahlian kejuruan. Institusi lain itulah yang disebut dengan institusi pasangan, yaitu institusi yang mengikatkan diri bekerjasama dengan lembaga pendidikan kejuruan.

b. Pola Kerjasama Program Pelatihan

Pelatihan menurut Mangkuprawira adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik, sesuai dengan standar.²³ Dengan mengacu pada inti dari prakerin, ini berarti sebagai kombinasi belajar dan praktik yang sesungguhnya di dunia usaha dan dunia industri. Sekolah memberikan teori dan pelatihan dalam membantu praktik, sedangkan praktik yang sebenarnya dilaksanakan DUDI. Sebelum melakukan praktik beberapa hal yang perlu disampaikan kepada peserta didik, antara lain :

- 1) Sebelum memulai praktik, siswa dibekali pengetahuan dan ketrampilan dasar, ini di capai melalui belajar di laboratorium yang menggambarkan lingkungan kerja di perusahaan.
- 2) Peraturan-peraturan yang diterapkan di tempat kerja diperkenalkan kepada siswa dengan mengundang guru tamu dari industri/perusahaan yang telah siap menerima siswa.
- 3) Siswa memahami pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menghadiri pelatihan keahlian tertentu yang berkaitan dengan program keahlian tanggung jawab mereka.
- 4) Siswa ditanamkan kesadaran bahwa latihan kerja di industri adalah jauh berbeda dari yang mereka pelajari di sekolah, siswa akan menghadapi kondisi kerja yang sesungguhnya di bawah pengawasan instruktur praktik latihan kerja industri.

²³ S. Mangkuprawira, *Manajemen Sumber Daya Strategik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 135.

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari program bersama antara SMK dan industri yang dilaksanakan di dunia usaha, industri.

c. Pola Kerjasama Program Produksi (Produk Inovatif)

Pola kerjasama dalam bidang produksi adalah suatu upaya dalam implementasi kurikulum, dengan metoda *Production Base Education* (PBE), dengan harapan untuk lebih mempertajam kompetensi yang didapatkan dari para peserta didik, hal ini bisa dilakukan apabila *set-up* peralatan dan sarana lab. Dan bengkel memadai untuk melakukan kegiatan produksi disamping tuntutan kompetensi para pengajar yang paling tidak setara dengan para supervisor industri, baik secara *hard skill* atau pun *soft skill*, pola ini lah nanti yang bisa disebut dengan *Teaching Factory*, dan ini bisa berjalan dengan efektif apabila pihak sekolah mampu meyakinkan industri disekitarnya untuk menjadi mitra dalam kegiatan produksi dan sekaligus menjadi vendor dari industri disekitarnya. Proses pelaksanaan akan ditangani secara professional oleh unit pelaksana teknis produksi dan *training* dibawah bidang kerjasama dan pelayanan Industri disetiap Sekolah Kejuruan (SMK).

d. Pola Kerjasama Program Penyaluran Lulusan

Keterserapan lulusan di dunia kerja dapat diartikan sebagai tingkat atau persentase keberhasilan lulusan untuk memasuki dunia kerja, dalam hal ini memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang telah didapatkan di bangku sekolah. Lulusan diharapkan mampu terserap langsung dalam dunia kerja.

Lulusan sesuai dengan sasaran pola penyelenggaraan kecakapan hidup, diharapkan dapat mencapai keberhasilan. Keberhasilan lulusan tersebut ditinjau dari²⁴:

- 1) Lulusan bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.

²⁴ Depdiknas, *Pengembangan Sistem dan Standart Pengelolaan SMK* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 3.

- 2) Tenggang waktu lulusan mendapatkan kerja setelah lulus maksimal satu tahun.
- 3) Keterserapan lulusan dalam periode dua tahun setelah lulus minimal 75%.
- 4) Jumlah lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja 5%.

Berdasarkan landasan di atas, dapat diuraikan bahwa lulusan diharapkan memperoleh jenis pekerjaan yang memiliki kriteria pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang telah diperoleh di bangku sekolah. Mengingat tujuan SMK adalah menciptakan lulusan siap kerja, maka dalam proses keterserapan lulusan ke dunia kerja diharapkan tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama dan proses penyalurannya sudah dapat dilakukan dengan baik, sehingga lulusan tidak akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau terserap ke dalam dunia kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator keterserapan dalam dunia kerja terdiri dari jumlah lulusan yang terserap dalam dunia kerja, jenis pekerjaan, waktu tunggu, proses mendapatkan pekerjaan, dan proses penyaluran lulusan.

Dengan adanya pola kerjasama Program Penyaluran lulusan adalah ujung tombak dari seluruh program, karena inilah yang akan menjadi tolak ukur dari keberhasilan dalam proses akhir dari kegiatan pembelajaran dengan harapan bahwa semua *output* menjadi *outcome*, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kerjasama industri kemitraan dalam proses *recruitment* lulusan, hal ini harus dilakukan dengan inisiatif dari pihak sekolah menyampaikan data dan kompetensi dari lulusan dan bisa memberikan jaminan bahwa lulusan yang akan disalurkan memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan standar kebutuhan industri, baik secara *Knowledge Skills* dan *Attitude*. Proses pelaksanaan akan ditangani secara profesional oleh unit pelaksana teknis PKL dan Penyaluran, dibawah bidang kerjasama dan pelayanan industri disetiap Sekolah Kejuruan (SMK).

Tujuan yang terpenting dari terjalannya kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri adalah untuk meningkatkan kompetensi para peserta didik yang berkualitas. Dengan ini, khususnya lembaga pendidikan kejuruan perlu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pada DUDI ataupun lembaga yang lainnya. Kerjasama harus dilakukan atas dasar saling menguntungkan dan harus mengidentifikasi ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan kedua belah pihak agar bermanfaat atau mendapatkan sebuah keuntungan.

Hal ini merujuk pada suatu konsep bahwa kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri sangat diperlukan, yaitu:

- 1) Mengusahakan kesesuaian (kesepadanan) antara rancangan program dengan berbagai ketrampilan-ketrampilan berproduksi yang telah diperlukan oleh DUDI
- 2) Menjadikan suatu kesempatan untuk pelatihan maupun praktik bagi para peserta didik, sehingga peserta didik secara nyata akan melakukan praktik pada dunia usaha dan dunia industri dengan kemampuan-kemampuan berproduksinya yang diperoleh dari proses belajar untuk memenuhi sebuah kebutuhan DUDI
- 3) Sebagai ajang untuk meningkatkan serta memantapkan para peserta didik dalam rekrutmen tenaga kerja baru dengan ketrampilan berproduksi yang telah dimilikinya.²⁵

Adapun tujuan dari pelaksanaan prakerin pada DUDI adalah untuk memberikan bekal nyata yang dapat dimanfaatkan siswa setelah lulus nanti ketika menghadapi berbagai bidang pekerjaan. Praktik kerja industri akan menciptakan peserta didik yang memiliki keahlian dan keterampilan yang relevan dengan DUDI sehingga

²⁵ Wahjosumijo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah – Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 199.

kelak mereka dapat mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya.²⁶

5. Kompetensi Kepemimpinan dalam Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan

Berdasarkan penelitian yang dihasilkan dari penelitian Banf Executive Leadership Inc, ada beberapa kompetensi inti yang sangat penting untuk mendukung model manajemen pendidikan berbasis kemitraan yakni, *visioning, strategic planning, customer focus, dan collaboration*.²⁷ Kompetensi kepemimpinan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan kerjasama kemitraan yang efektif dan efisien, yakni memiliki kompetensi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan gambaran/keadaan kedepan yang jelas dan disepakati oleh partner/mitra serta mensosialisasikan visi tersebut kepada seluruh stakeholders
 - b. Menata proses perencanaan strategis yang interaktif dan terintegrasi dengan semua stakeholders berdasarkan analisa akurat mengenai lingkungan, keingan pelanggan, dan kebutuhan masing-masing instansi yang bermitra.
 - c. Kemampuan untuk memahami kebutuhan pelanggan serta bekerjasama dengan pelanggan untuk mengidentifikasi riil kebutuhan di lapangan
 - d. Memetakan jaringan relasi dari saingan strategis yang sudah ada / potensial dengan orientasi pada perspektif kedepan.²⁸
- #### 6. Konsep Organisasi Kemitraan Yang Efektif

Efektifitas organisasi menurut Tony Lendrum ditentukan oleh tiga elemen penting yaitu lingkungan (*environment*), proses (*process*), dan manusia (*people*).²⁹ Ketiga elemen ini secara bersama-sama akan menentukan keberhasilan dan efektifitas kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Lingkungan dapat memberikan

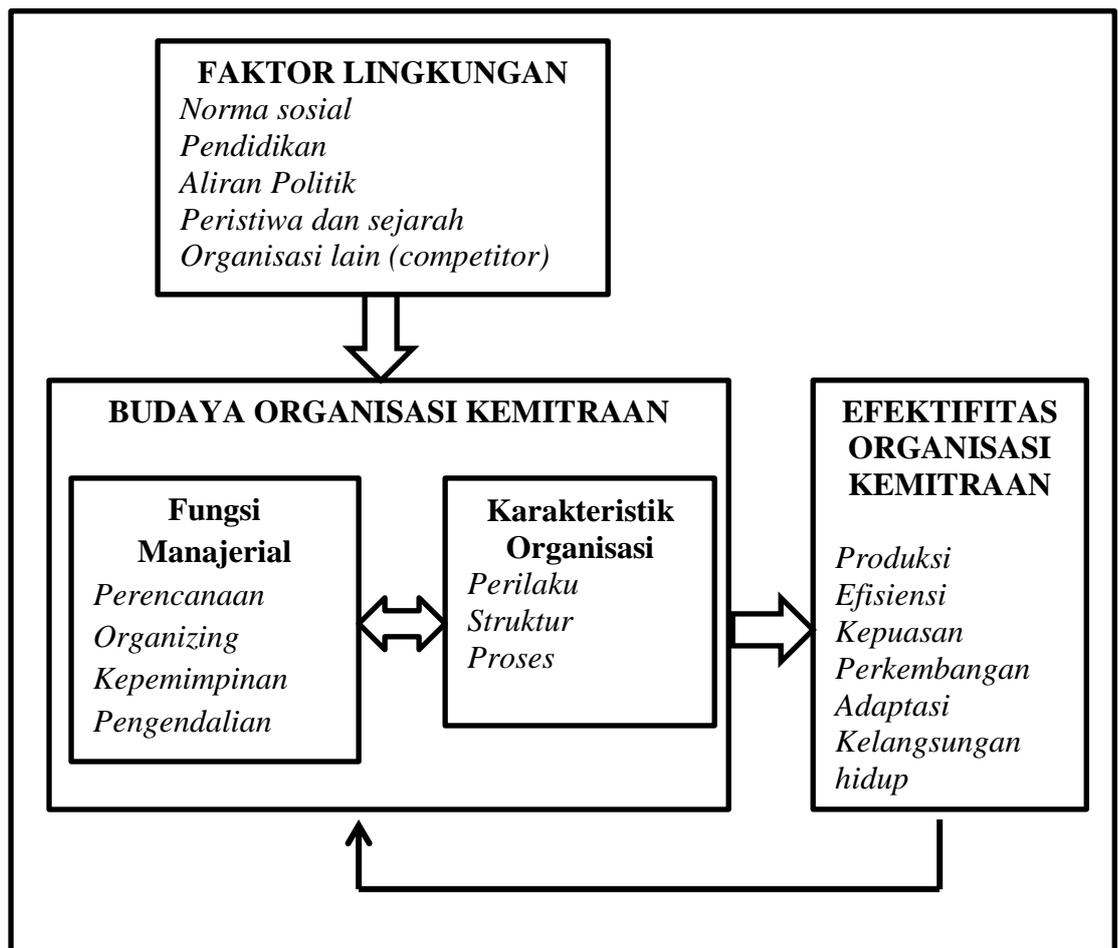
²⁶ Wahyudi, dkk, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (Bandung: IMTIMA Press, 2007), 330.

²⁷ Nana Rukmana, *Strategic Partnering*, 82.

²⁸ Ibid, 84.

²⁹ Ibid, 87.

batasan pada lembaga pendidikan yang bermitra dalam operasionalisasi kegiatan bersama. Hal ini tentu akan dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi, strategi, dan struktur organisasi kemitraan serta kondisi tempat kerja. Budaya organisasi mencakup keyakinan dasar organisasi dan sistem nilai. Meskipun lingkungannya baik dan prosesnya efektif, tetap tidak akan berhasil tanpa keterlibatan orang-orang yang tepat, baik secara individu maupun dalam tim untuk menjalankan pola kemitraan ini. Lebih khusus lagi, peranan manager masing-masing mitra dalam mengembangkan visi bersama sangat penting untuk mendukung keberhasilan kemitraan.



Budaya dan Efektifitas Organisasi Kemitraan

Sumber : Diolah dari James L. Gibson, John M. Ivancevich dan James H. Donnelly³⁰

³⁰ Ibid, 90.

B. Konsep *Life Skill*

Konsep *life skill* merupakan salah satu fokus analisis dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada kecakapan hidup atau bekerja. *Life skills* memiliki makna yang lebih luas dan *employability skills* dan *vocational skills*. Keduanya merupakan bagian dari program *life skills*. Dengan kata lain *life skills* dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup.

1. Pengertian Pembelajaran *Life skills*

Secara harfiah kata *skills* dapat diterjemahkan dengan keterampilan namun dalam konteks ini maknanya menjadi terlalu sempit atau konsepnya kurang luas dari makna yang sebenarnya. Oleh karena itu kata yang dipandang lebih memadai untuk menerjemahkan kata *skills* dalam konteks ini adalah kecakapan.³¹

Menurut Brodin dalam bukunya Anwar yang berjudul Pendidikan Kecakapan Hidup Konsep dan Aplikasi menjelaskan bahwa : “*Life skills constitute a continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to function effectively and to averted interruptions of employment experience*”. Kecakapan hidup merupakan sebuah rangkaian kesatuan tentang sebuah pengetahuan dan itu merupakan kebutuhan seseorang untuk tujuan yang efektif dalam memecahkan masalah dari sebuah pengalaman. Dengan demikian *life skills* dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup.³²

Departemen pendidikan Nasional membagi pendidikan kecakapan hidup menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Kecakapan personal (*personal skills*) yang mencakup kecakapan mengenal diri (*self awareness*) dan kecakapan berfikir rasional (*thinking skills*)
- b. Kecakapan sosial (*social skills*)
- c. Kecakapan akademik (*academic skills*)

³¹ Sri Sumarni, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Kajian Tentang Konsep, Problem dan Prospek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Tarbiyah, 2002), 172.

³² Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup, Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2004), 20.

d. Kecakapan vocational (*vocational skills*)

Sesuai dengan penjelasan dari UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 3, pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vocational untuk bekerja atau usaha mandiri.

a. Kecakapan Hidup General (*General Life skills/GLS*)

Kecakapan hidup general (*general life skill/GLS*) merupakan kecakapan yang diperlukan semua orang, baik mereka yang bekerja, belum bekerja, tidak bekerja maupun mereka yang masih menempuh pendidikan.³³ GLS dibagi menjadi: kecakapan mengenal diri (*personal skill*), kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*), kecakapan sosial (*social skill*).

1) Kecakapan Mengenal Diri

Siti Irene Astuti D, menyatakan bahwa kecakapan mengenal diri (*self awarness*) atau kecakapan personal (*personal skill*) mencakup:

- a) Penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta
- b) Menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.³⁴

Pada dasarnya, kecakapan kesadaran diri merupakan penghayatan diri sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara, sebagai bagian dari lingkungan, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal untuk meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Kesadaran diri

³³ Sukidjo. *Peranan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life skills) dalam Mengatasi Pengangguran Terdidik*. (Yogyakarta: Cakrawala Pendidikan November. LPM UNY, 2003), 431.

³⁴ Siti Irene Astuti D. *Pengembangan Kecakapan Hidup (life skills) melalui Peranan Etos Kerja dan Membangun Kreativitas Anak*. (Yogyakarta: Cakrawala Pendidikan Februari. LPM UNY), 26.

menciptakan proses internalisasi dari informasi yang diterima yang pada saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan menjadi perilaku keseharian. Oleh karena itu, walaupun kesadaran diri lebih merupakan sikap, namun diperlukan kecakapan untuk menginternalisasi informasi menjadi nilai-nilai dan kemudian mewujudkan menjadi perilaku keseharian.³⁵

2) Kecakapan Berpikir Rasional

Pada dasarnya, kecakapan berpikir merupakan kecakapan menggunakan pikiran/rasio secara optimal.³⁶ Kecakapan berpikir mencakup:

- a) Kecakapan menggali dan menemukan informasi (*information searching*).
- b) Kecakapan mengelola informasi dan mengambil keputusan secara cerdas (*information processing and decision making skills*).
- c) Kecakapan memecahkan masalah secara arif dan kreatif (*creative problem solving skill*).

Dengan pemberian kecakapan berpikir rasional, peserta didik akan dilatih bertindak secara kreatif yang bukan hanya dalam mencari informasi-informasi maupun ide baru yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya tetapi juga dapat menilai informasi dan ide yang ditawarkan kepadanya baik atau buruk sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya terutama masalah di kehidupan nyata. Dengan kemampuan berpikir rasional diharapkan siswa selain terlatih bertindak secara kreatif juga terlatih sensitif terhadap fakta yang penuh misteri, termotivasi untuk bertanya tentang informasi yang relevan, menciptakan ide baru, memandang problem dengan cara baru, merencanakan penanggulangan yang sistematis terhadap masalah, mengevaluasi gagasan dan memperoleh solusi dari permasalahan.

³⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Sekolah Life skills, Lulus Siap Kerja*. (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 39-40.

³⁶ Ibid, 44.

3) Kecakapan Sosial

Kecakapan sosial (*social skill*) mencakup:

a) Kecakapan bekerjasama (*collaboration skill*)

Kecakapan bekerjasama sangat diperlukan, karena sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu bekerjasama dengan manusia lain. Kerja sama bukan sekedar “kerja bersama”, tetapi kerjasama yang disertai dengan saling pengertian, saling menghargai, dan saling membantu.³⁷

b) Kecakapan komunikasi dengan empati (*communication skill*)

Empati, sikap penuh pengertian dan komunikasi dua arah perlu ditekankan, karena yang dimaksud berkomunikasi di sini bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga isi pesannya sampai dan disertai dengan kesan baik yang dapat menumbuhkan hubungan harmonis. Menurut Suparno, dalam belajar dengan orang lain maupun masyarakat luas, seseorang perlu menguasai kecakapan-kecakapan yang memungkinkan seseorang dapat diterima oleh lingkungannya sekaligus dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Kecakapan-kecakapan yang harus dipelajari yaitu: 1) Pernyataan ungkapan-ungkapan penghargaan, kekaguman maupun ketidaksetujuan. 2) Pernyataan yang bersifat rutin, seperti mempersilahkan, minta maaf, berterima kasih 3) Pembicaraan tidak resmi, termasuk mengobrol, melucu, berguncing (*gossip*), dan 4) Membangun relasi pertemanan. Selanjutnya, Machasin yang dikutip Pardjono memberikan beberapa contoh kecakapan sosial dan interpersonal yang harus dikembangkan melalui proses pendidikan antara lain: 1) Kemampuan dan keberanian untuk menampilkan diri secara yakin. 2) Keberanian dan kecakapan untuk mengingatkan warga lain dengan cara yang tepat. Semangat memperbaiki keadaan yang salah, ada dibalik kecakapan ini. Kemampuan untuk menerima peringatan dari orang lain. 3) Interaksi secara positif, yakni

³⁷ Ibid, 50.

memberi dan menerima atau saling belajar. Pengalaman dan jati diri orang lain, disamping sikap dan tindakannya menjadi pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kecakapan diri. 4) Komunikasi dan dialog, yakni kecakapan untuk menyampaikan pendapat, perasaan, keinginan diri dan sebagainya kepada orang, dan memahami serta menghargai pernyataan orang lain. 5) Penyesuaian diri dalam lingkungan sosial, yakni kecakapan untuk mengetahui batas kebebasan sehingga tidak melanggar batas kebebasan orang lain.

b. Kecakapan Hidup Spesifik (*Specific Life skills/SLS*)

Kecakapan hidup yang bersifat spesifik (*specific life skill/SLS*) diperlukan seseorang untuk menghadapi problem bidang khusus tertentu. Misalnya, untuk memecahkan masalah dagangan yang tidak laku, tentu diperlukan kecakapan pemasaran. Kecakapan hidup spesifik biasanya terkait dengan bidang pekerjaan (*occupational*), atau bidang kejuruan (*vocational*) yang ditekuni atau akan dimasuki. Kecakapan hidup seperti itu kadang-kadang juga disebut dengan kompetensi teknis (*technical competencies*) dan itu sangat bervariasi, tergantung kepada bidang kejuruan dan pekerjaan yang akan ditekuni. Namun demikian masih ada kecakapan yang bersifat umum, yaitu bersikap dan berlaku produktif (*to be a productive people*). Artinya, apapun bidang kejuruan atau pekerjaan yang dipelajari, bersikap dan berperilaku produktif harus dikembangkan. Bidang pekerjaan biasanya dibedakan menjadi bidang pekerjaan yang lebih menekankan pada keterampilan manual dan bidang pekerjaan yang menekankan pada kecakapan berpikir. Terkait dengan itu, pendidikan kecakapan hidup yang bersifat spesifik juga dapat dipilah menjadi kecakapan akademik (*academic skill*) dan kecakapan vokasional (*vocational skill*).

1) Kecakapan Akademik

Kecakapan akademik disebut juga dengan kecakapan berpikir ilmiah. Kecakapan ini menurut tim BBE, merupakan kecakapan

dalam berpikir yang terkait dengan sifat akademik atau keilmuan yang mencakup antara lain: kecakapan melakukan identifikasi variabel, kecakapan menjelaskan hubungan antara variabel, merumuskan hipotesis, dan kemampuan merancang penelitian dan melaksanakan penelitian. Kecakapan akademik (*academic skill/AS*) yang seringkali juga disebut kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir pada GLS (*general life skills*). Jika kecakapan berpikir pada GLS masih bersifat umum, kecakapan akademik sudah lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat akademik/keilmuan. Hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa bidang pekerjaan yang ditangani memang lebih memerlukan kecakapan berpikir ilmiah.

Kecakapan berpikir ilmiah atau kecakapan akademik merupakan kecakapan berpikir yang sistematis dan komprehensif. Kemampuan merancang suatu penelitian melibatkan berbagai kecakapan berpikir, antara lain kecakapan berpikir rasional, kecakapan berpikir analitis, berpikir kritis, dan kecakapan pemecahan masalah yang dibangun secara sistematis dan sistematis. Kecakapan ini juga bisa dikembangkan melalui pembelajaran suatu bidang studi secara integratif seperti kecakapankecakapan hidup lainnya. Kemampuan akademik sebagai salah satu usaha membekali peserta didik agar mampu merancang suatu penelitian melibatkan berbagai kecakapan berpikir. Menurut Pardjono, yang termasuk kecakapan berpikir antara lain: kecakapan berpikir rasional, kecakapan berpikir analitis, berpikir kritis, dan kecakapan pemecahan masalah yang dibangun secara sistematis.

Proses berpikir ini pada dasarnya mengenalkan peserta didik pada tahapan-tahapan berpikir yang sistematis atau runtut berdasarkan kepada bukti-bukti yang ada dalam menarik kesimpulan. Berpikir induktif merupakan usaha menemukan

alasan-alasan atau bukti-bukti dari sebuah kesimpulan yang telah diketahui dan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan percobaan (eksperimen). Sedangkan berpikir deduktif merupakan suatu usaha dalam menemukan sebuah kesimpulan berdasarkan alasan-alasan yang diketahui. Tentu saja harus disadari bahwa tidak semua aspek dalam kecakapan akademik dapat dan perlu dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Mungkin saja hanya sampai identifikasi variabel dan mempelajari hubungan antar variabel tersebut. Mungkin juga sampai merumuskan hipotesis dan bahkan ada yang dapat sampai mencoba melakukan penelitian, sesuai dengan tingkat pendidikannya. Pola seperti itu oleh para ahli disebut pola belajar dengan cara meniru bagaimana ahli (ilmuwan) bekerja. Pola ini sangat penting bagi siswa atau mahasiswa yang akan menekuni pekerjaan yang mengandalkan kecakapan berpikir, karena pola pikir seperti itulah yang nantinya digunakan dalam bekerja.

2) Kecakapan Vokasional

Kecakapan vokasional (*vocational skill/VS*) seringkali disebut dengan “kecakapan kejuruan”. Artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional lebih cocok bagi siswa yang akan menekuni pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan psikomotor dari pada kecakapan berpikir ilmiah.

Kecakapan vokasional mempunyai dua bagian, yaitu: kecakapan vokasional dasar (*basic vocational skill*) dan kecakapan vokasional khusus (*occupational skill*) yang sudah terkait dengan bidang pekerjaan tertentu. Kecakapan dasar vokasional mencakup antara melakukan gerak dasar, menggunakan alat sederhana bagi semua orang yang menekuni pekerjaan manual, dan kecakapan membaca gambar sederhana. Di samping itu, kecakapan vokasional dasar mencakup aspek sikap taat asas, ketepatan, akurasi dan tepat waktu yang mengarah pada

perilaku produktif. Kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Misalnya, mengajar siswa di sekolah khususnya mata pelajaran agama. Namun demikian, sebenarnya terdapat satu prinsip dasar dalam kecakapan vokasional, yaitu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. *Vocational skills* merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum/program pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat, dan bukan untuk mengubah total kurikulum / program yang telah ada. Kehadiran vocational skills mengindikasikan perlunya penyesuaian-penyesuaian kurikulum / program pembelajaran yang belum sesuai dengan kondisi nyata masyarakat setempat.

2. Manfaat *Life Skill*

Pendidikan *Life Skill* merupakan terobosan progresif bagi dunia pendidikan, sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Muksin Wijaya dalam bukunya Jamal Ma'mur Asmani, pendidikan kecakapan hidup bertujuan mengembangkan potensi peserta didik yang merupakan filosofi pendidikan sebenarnya.³⁸ Secara khusus, pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Mengaktualisasi potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi
- b. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis keluasan
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah dengan memberikan peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
- d. Memberikan wawasan yang luas dalam mengembangkan karir
- e. Memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

³⁸ Jamal Ma'mur Asmani, "*Sekolah Life Skill*" *Lulus Siap Kerja!* (Jogjakarta: Diva Press, 2009), 75.

Esensi dari pendidikan kecakapan hidup adalah untuk meningkatkan relevansi (kesesuaian) pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan nyata. Secara umum, manfaat pendidikan kecakapan hidup bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan masalah (problem) hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Jika hal itu dapat dicapai, maka faktor ketergantungan terhadap lapangan pekerjaan yang sudah ada dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap. Sedangkan orientasi *Life Skill* adalah menganggap mata pelajaran sebagai alat, bukan sebagai tujuan yang terkait langsung dengan kondisi dan potensi lingkungan. Pembelajaran dirancang untuk meningkatkan ketrampilan proses. Pembelajaran terpadu dan kontekstual anatara teori dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi pembelajaran dilakukan dalam bentuk kerja, tes perbuatan, dan observasi (pengamatan) dengan pemecahan masalah mencakup; uji kinerja, perilaku, kejujuran, dan disiplin (bukan hanya tes tulis).

3. Kendala Membangun Pendidikan Berbasis *Life Skill*

Dalam rangka membangun pendidikan *Life Skill*, banyak kendala yang dihadapi. Kendala tersebut harus diselesaikan secara baik dan bijaksana. Kendala tersebut antara lain :

e. Minimnya sosialisasi pemerintah

Selama ini, khususnya di pedesaan dan daerah terpencil, pendidikan *Life Skill* masih menjadi barang mahal. Sosialisasi yang diberikan pemerintah masih sangat minim.³⁹ Sosialisasi yang minim ini membuat kesadaran di level bawah sangat kurang. Mereka tidak memahami apa itu pendidikan *life skill*, bagaimana mengimplementasikannya, dan lain sebagainya. Mengingat pentingnya pendidikan berbasis *life skill* yang mampu mengangkat kebangkitan bangsa, maka pemerintah seyogyanya melakukan kegiatan sosialisasi mulai dari pusat sampai paling bawah secara massif dan menyeluruh, melakukan monitoring secara ketat, dan

³⁹ Ibid, 195.

memberikan bimbingan implementasi secara memadai. Kalau hal ini dilakukan, kemungkinan besar kesadaran akan pentingnya pendidikan berbasis *life skill* akan meningkat dan akan ditindak lanjuti di sekolah-sekolah. Pemerintah dalam hal ini harus terus menerus memberikan motivasi, bimbingan, dan memfasilitasi bawahannya agar menerapkan pendidikan berbasis *life skill*. Dengan pendidikan *life skill* ini, lembaga pendidikan diharapkan mampu menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

f. Langkanya pemimpin transformatif

Karena pendidikan *life skill* adalah hal baru yang tidak mudah dipahami dan diimplementasikan di bawah, maka dibutuhkan sosok pemimpin yang visioner dan transformatif yang mampu menggugah kesadaran dan mengelola secara profesional di lapangan. Pemimpin visioner dan transformatif mampu mencari terobosan dan perubahan secara mendasar dan signifikan dalam semua aspek, khususnya dalam mencari solusi, tidak terjebak pada formalitas dan simbolitas kurikulum tanpa mengetahui ruhnya, orientasi, visi, dan target yang dicanangkan.

g. Sarana prasarana dan finansial

Pendidikan *life skill* membutuhkan sarana prasarana yang memadai dan sesuai dengan fungsinya. Disini dibutuhkan anggaran yang besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana prasarana ini, jangan sampai lembaga pendidikan membebani anak didik. Dibutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bisa diajak tolong menolong selama tidak mengikat, dibutuhkan perencanaan yang prospektif dan kontinu, serta dibutuhkan terobosan-terobosan ekonomi yang kompetitif. Selama ini, yang membuat dunia pendidikan jalan ditempat, tidak inovatif dan kreatif, adalah faktor finansial. Para penyelenggara pendidikan menyerah terhadap ketidakberdayaan. Akhirnya generasi masa depan yang lahir dari lembaga semacam ini tidak mempunyai kualifikasi keilmuan teoritis dan praktis yang bisa diandalkan, baik dalam aspek keilmuan,

kebudayaan, sosial, dan lapangan pekerjaan praktis yang semuanya membutuhkan keahlian dan keunggulan pengetahuan dan teknologi.

h. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber daya manusia menempati urutan terdepan dalam menggerakkan potensi anak didik dalam segala hal, termasuk di dalamnya pendidikan *life skill*. Dalam konteks ini, guru memiliki peran yang sangat vital, karena guru harus menjadi sosok yang inspiratif, kreatif, dan inovatif dalam mengemban tugas sucinya, mengajarkan keilmuan, mendorong kemajuan, dan memfasilitasi aspirasi dan ide-ide anak didik. Dalam dunia pendidikan, SDM tidak hanya tergantung pada guru, seluruh elemen pendidikan juga ikut terlibat di dalamnya. Perpaduan dari semua elemen inilah yang akan menghasilkan output yang kompetitif dan produktif. Karena hasil sangat tergantung proses dan proses tergantung dari pelaku yang menggerakkan dan melaksanakan proses tersebut.

C. Madrasah Aliyah Program Keterampilan

1. Dasar Hukum

Pendidikan keterampilan vokasional di MA merupakan program formal yang diselenggarakan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1023 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah Aliyah.

2. Pengertian Pendidikan Keterampilan Vokasional (*Vocational Skill*)

Pendidikan keterampilan terdiri dari dua kata, yakni pendidikan dan keterampilan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan keterampilan berasal dari akar kata terampil yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu, dan cekatan. Selain itu keterampilan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan atau menggunakan pengetahuan yang dikuasainya dalam suatu bidang kehidupan.⁴⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bahwa keterampilan mengacu pada kemampuan melakukan sesuatu dalam cara yang efektif. Sedangkan kata vokasional berarti bersangkutan dengan sekolah (kejuruan).

Pendidikan vokasional sering juga disebut dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan okupasi artinya adalah pendidikan yang menyiapkan lulusannya yang mampu dan mau bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.⁴¹ Secara substansial pendidikan vokasional adalah pendidikan yang memiliki misi mengembangkan sikap profesional peserta didik sehingga mampu bersaing dan bekerja serta memiliki karir yang baik. Pendidikan vokasional bertanggung jawab membekali peserta didik dengan wawasan, kemampuan, dan keterampilan di bidang industri serta mengembangkan kemampuan untuk menguasai dan menyenangkan jenis pekerjaan tertentu.

Pendidikan keterampilan vokasional berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan keterampilan vokasional adalah jenis pendidikan yang

⁴⁰ Sukmadinata, Nana Syaodih dan Erliana Syaodih, *Kurikulum dan pembelajaran kompetensi* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 184.

⁴¹ Husaini Usman, *Manajemen teori, praktik, dan riset pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 7.

mempersiapkan lulusannya memasuki dunia pekerjaan sehingga *market oriented* akan menjadi karakteristik utama bagi pendidikan ini.⁴² Kebutuhan pasar yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan teknologi menuntut sekolah yang mengembangkan pendidikan keterampilan vokasional harus secara terus-menerus melakukan inovasi. Pembelajaran dalam pendidikan keterampilan vokasional harus diarahkan pada peningkatan kualitas keterampilan vokasional dan penilaian kemampuan peserta didik harus sesuai dengan standar kerja industri.⁴³

3. Kedudukan Program Ketrampilan di Madrasah

Program ketrampilan di Madrasah Aliyah merupakan program tambahan sebagai bentuk tambahan lintas minat di Madrasah Aliyah penyelenggara program ketrampilan. Program ini bukan merupakan Madrasah Aliyah Kejuruan. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Ketrampilan ini menggunakan struktur kurikulum yang berlaku di Madrasah Aliyah pada umumnya, dan peserta didik memperoleh tambahan pembelajaran ketrampilan sesuai dengan minat masing-masing peserta didik.

Program ketrampilan yang diselenggarakan di Madrasah Aliyah masuk dalam beban belajar/struktur kurikulum Madrasah Aliyah pada mata pelajaran prakarya/kewirausahaan dengan jumlah jam per minggu 2 jam pelajaran, dan untuk Madrasah Aliyah Penyelenggara Program Ketrampilan ditambah materi lintas minat ketrampilan dengan jumlah jam per minggu 6 jam pelajaran. Apabila dipandang bahwa dari alokasi beban belajar tersebut masih perlu tambahan sesuai kebutuhan, maka Madrasah dapat menambah sesuai kondisi madrasah masing-masing.

Untuk memperoleh hasil maksimal program ini harus terintegrasi dengan kurikulum dan harus dipastikan bahwa program ketrampilan di Madrasah Aliyah tidak mengurangi jumlah jam dari mata pelajaran yang ada. Dengan pola ini, diharapkan program ketrampilan menghasilkan output seperti yang diharapkan. Output yang diharapkan adalah siswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar minimal yang dipersyaratkan

⁴² Sukmadinata, Nana Syaodih dan Erliana Syaodih, *Kurikulum*.....,23.

⁴³ Ibid, 40.

oleh dunia usaha.dunia industri terkait. Pelaksanaan program Ketrampilan di Madrasah Aliyah ini diberikan selama 3 tahun pembelajaran dan dapat dilengkapi dengan permagangan dan sertifikasi keahlian.⁴⁴

⁴⁴ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1023 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Ketrampilan di Madrasah Aliyah, 2.